

KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja** Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2023 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2023 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi*.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Kehutanan tahun 2023.

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP 197405081999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I : PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023		
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....		7
2. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi		42
3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi		43
4. Rancangan Awal RKPD		44
 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
1. Telaahan Terhadap Kebijakan		49
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi		51
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023		
1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023.....		55
 BAB V : PENUTUP		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan instansi daerah Provinsi Jambi yang mengurus bidang kehutanan. Potensi sumber daya hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital untuk dipertahankan keberadaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian. Secara garis besar hutan mempunyai fungsi ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial. Agar memperoleh manfaat dari fungsi tersebut, hutan harus dikelola dengan arif dan bijaksana.

Semakin disadari bahwa kelestarian sumber daya hutan merupakan aset dan modal dasar bagi pembangunan Provinsi Jambi. Lebih jauh bahwa upaya pelestarian sumber daya hutan bukanlah hanya demi kelestarian hutan atau alam itu sendiri, namun hakekatnya adalah untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. Melihat kecenderungan global dengan berbagai isu strategis baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional bahwa keberadaan hutan dengan berbagai aspeknya pada masa yang akan datang tetap merupakan suatu pilihan.

Seirama dengan adanya pergeseran strategi pembangunan Kehutanan dari *conventional forestry* menuju *Forest Resource and community based Management*. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi* telah menempatkan program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lingkungan dan rendah karbon dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian daerah.

Jambi sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan unik serta kelengkapan diversitas potensi alam juga melengkapi khasanah alam Jambi dengan semboyan “*Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*”. Namun khasanah sumberdaya hutan di Provinsi Jambi tentunya menyimpan tantangan pada berbagai tahapan pengelolaannya. Keadaan ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga upaya untuk mencapai kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kenyataan. Permasalahan dan dinamika dalam suatu pengelolaan hutan hendaknya menghantarkan pada suatu kesadaran dan penyadaran tentang pentingnya kelestarian sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 adalah $\pm 1.428.728,74$ Ha atau $\pm 42,98$ % dari luas daratan di Provinsi Jambi.

Pembagian kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri dari :

a.	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 264.513,05$ Ha
b.	Hutan Produksi Tetap	$\pm 954.278,46$ Ha
c.	Hutan Produksi Konversi	$\pm 11.108,44$ Ha
d.	Hutan Lindung	$\pm 180.778,05$ Ha
e.	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	$\pm 713.803,62$ Ha

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
- i. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- r. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.
- c. Penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

4. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

BAB III TUJUAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dijadikan sebagai substansi pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023. Evaluasi diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi pada kelompok Belanja Langsung.

2.2. Pencapaian Kinerja program /Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp 68.295.948.351,- yang diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sisi keuangan sampai dengan semester I terealisasi sebesar **Rp. 32.997.703,134** (keuangan 48,32%) (fisik 50,35%).

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan 48 **Sub kegiatan** dari 21 **kegiatan** dalam **5 Program** untuk memenuhi Kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi. Terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Program Penunjang Urusan Pemerintah memiliki 6 (Enam) kegiatan bertujuan agar optimalisasi dalam pelayanan, total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar **Rp. 53.530.712.836,-** melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Realisasi Rp.

29.166.958.962,- atau sebesar 54,49% sedangkan realisasi fisik 55,60%.

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 396.047.600,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 169.641.787,- atau 42,83%, dengan realisasi fisik sebesar 52,44%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya penyusunan laporan keuangan berupa RKA, RKA-P, LKPJ, LKj dan laporan keuangan lainnya dan monitoring kegiatan bidang kehutanan di 11 KPHP/KPHL dan 1 UPTD Tahura di Provinsi Jambi.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 44.848.034.151,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.481.762.456,- atau 59,04%, dengan realisasi fisik sebesar 59,21%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan pemenuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk mendukung tertib administrasi dan pengelola keuangan, sesuai target kinerja sepanjang tahun 2023.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 389.201.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 122.044.000,- atau 31,36%, dengan realisasi fisik sebesar 39,28%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 549.199.875,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 314.923.133,- atau 57,34%, dengan realisasi fisik sebesar 60,45%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Kerinci)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 113.485.690,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 54.206.788,- atau 47,77%, dengan realisasi fisik sebesar 55,09%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Kerinci Unit 1 dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bungo)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 122.348.326,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 50.585.596,- atau 45,03%, dengan realisasi fisik sebesar 60,67%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

7. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Merangin)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 138.095.500,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 65.134.168,- atau 47,17%, dengan realisasi fisik sebesar 54,98%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI bertujuan menyelenggarakan dan

memberikan suatu pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari secara tertib.

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 126.848.174,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 58.965.762,- atau 46,49%, dengan realisasi fisik sebesar 59,45%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi di perkantoran UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 97.452.089,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 30.609.855,- atau 31,41%, dengan realisasi fisik sebesar 31,41%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

10. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Tebo Barat)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 60.384.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 12.586.150,- atau 20,84%, dengan realisasi fisik sebesar 43,34%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo barat Unit IX bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX terpenuhi sehingga penyelenggaraan fasilitasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

11. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tebo Timur)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 59.284.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 16.028.300,- atau 27,04%, dengan realisasi fisik sebesar 46,95%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo Timur Unit X bertujuan agar urusan perkantoran baik yang dilaksanakan seksi-seksi maupun di Tata Usaha dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran.

12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Batanghari)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 107.120.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 47.515.790,- atau 44,36%, dengan realisasi fisik sebesar 44,93%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII bertujuan agar pelayanan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan penunjang operasional agar terwujud tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari.

13. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 82.036.840,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 28.565.585,- atau 34,82% dengan realisasi fisik sebesar 39,83%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII bertujuan agar dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya berbagai unsur kebutuhan administrasi perkantoran.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Timur)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 84.585.880,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 33.187.550,- atau 39,24%, dengan realisasi fisik sebesar 42,53%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XIV bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

15. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Barat)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 122.054.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 62.862.100,- atau 51,50%, dengan realisasi fisik sebesar 51,50%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,V dan XVI,I bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

16. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tahura)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 84.052.795,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.765.453,- atau 30,65%, dengan realisasi fisik sebesar 55,44%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD TAHURAI bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan ATK, penggandaan, dan keperluan kantor lainnya serta pemenuhan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam setahun dengan target kinerja 100 %.

17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 722.358.969,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 328.841.412,- atau 45,52%, dengan realisasi fisik sebesar 47,31%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan agar terlaksananya program dan kegiatan tersebut kinerja aparatur instansi / OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bahan dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kerinci)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 113.485.690,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 54.206.788,- atau 47,77% dengan realisasi fisik sebesar 55,09%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Kerinci

Unit 1 dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

19. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bungo)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 86.000.000,- atau 86,87%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

20. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Merangin)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 108.184.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 94.804.400,- atau 87,63% dengan realisasi fisik sebesar 91,60%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI bertujuan menyelenggarakan dan memberikan suatu pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari secara tertib.

21. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 126.848.174,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 58.965.762,- atau 46,49%, dengan realisasi fisik sebesar 59,45%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi di perkantoran UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

22. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%, dengan realisasi fisik sebesar 0%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

23. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tebo Barat)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 60.384.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 12.586.150,- atau 20,84% dengan realisasi fisik sebesar 43,34%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo barat Unit IX bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX terpenuhi sehingga penyelenggaraan fasilitasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

24. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tebo Timur)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 59.284.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 16.028.300,- atau 27,04%, dengan realisasi fisik sebesar 46,95%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo Timur Unit X bertujuan agar urusan perkantoran baik yang dilaksanakan seksi-seksi maupun di Tata Usaha dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran.

25. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Batanghari)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 107.120.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 47.515.790,- atau 44,36%, dengan realisasi fisik sebesar 44,93%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII bertujuan agar pelayanan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan penunjang operasional agar terwujud tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari.

26. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 82.036.840,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 28.565.585,- atau 34,82%, dengan realisasi fisik sebesar 39,83%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII bertujuan agar dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya berbagai unsur kebutuhan administrasi perkantoran.

27. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tanjung Jabung Timur)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 84.585.880,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 33.187.550,- atau 39,24%, dengan realisasi fisik sebesar 42,53%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XIV bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

28. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tanjung Jabung Barat)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 72.177.750,- atau 55,52%, dengan realisasi fisik sebesar 55,52%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP

Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

29. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahura)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 84.052.795,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.765.453,- atau 30,65%, dengan realisasi fisik sebesar 55,44%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD TAHURA bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan ATK, penggandaan, dan keperluan kantor lainnya serta pemenuhan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam setahun dengan target kinerja 100 %.

30. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah anggaran sebesar Rp. 987.114.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 354.380.959,- atau 35,90%, dengan realisasi fisik sebesar 36,73%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan guna pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor dalam setahun sesuai dengan target kinerja 100%, sehingga pencapaian program memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

II. Program Pengelolaan Hutan.

Program Pengelolaan Hutan memiliki 17 (Tujuh belas) kegiatan bertujuan agar mengoptimalkan pengelolaan hutan di kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.390.681.616,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Realisasi Keuangan Rp. 446.317.873,- atau sebesar 32,09% sedangkan realisasi fisik 3,11%.

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

- a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dinas)
Jumlah anggaran Rp. 157.690.000 ,- realisasi keuangan sebesar Rp. 34.838.804,- atau 22,09% realisasi fisik sebesar 50,09%. kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
- b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Kerinci Unit I)
Jumlah anggaran Rp. 75.452.000,- realisasi keuangan Rp. 24.815.500 atau 32,89% realisasi fisik sebesar 86,46% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
- c. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)
Jumlah anggaran Rp. 39.164.796,- realisasi keuangan Rp. 39.164.796 atau 100% realisasi fisik sebesar 100% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
- d. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)
Jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 23.652.000 atau 47,30% realisasi fisik sebesar 50,00% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
- e. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun), jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- realisasi keuangan Rp. 8.432.000 atau 21,96% realisasi fisik sebesar 31,91% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
- f. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX), jumlah anggaran Rp. 37.265.000,- realisasi fisik sebesar 15,12% kegiatan ini

dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.

- g. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII), jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- realisasi fisik sebesar 66,53% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
 - h. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV), jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- realisasi fisik sebesar 39,06% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
 - i. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV), jumlah anggaran Rp. 52.329.000,- realisasi fisik sebesar 44,00% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.
2. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)
Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 93.877.250,- Realisasi Fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Pembangunan KPHP/KPHL berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari.
 - b. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII).
Jumlah anggaran Rp. 126.306.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.277.000,- Realisasi Fisik sebesar 43,09%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Pembangunan KPHP/KPHL

berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari.

- c. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun). Jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.432.000,-, Realisasi Fisik sebesar 31,91%. kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Pembangunan KPHP/KPHL berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari.

3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 1.812.304.320,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 72.990.600,- yang terealisasi keuangan sebesar 4,03% Realisasi fisik sebesar 4,84% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semeseter I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
- b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan

b. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Merangin Unit IV,V dan VI)

Jumlah anggaran Rp. 2.126.095.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 361.971.170,- yang terealisasi keuangan sebesar 17,03% realisasi fisik sebesar 17,12% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semeseter I yaitu :

- c. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
- d. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan

c. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Limau Unit VII Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 14.565.000,- yang terealisasi keuangan sebesar

29,13% realisasi fisik sebesar 52,84% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
- b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
- d. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Unit VIII Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 767.460.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 9.960.000,- yang terealisasi keuangan sebesar 1,30% realisasi fisik sebesar 1,61% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
- b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
- e. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Tebu Timur)

Jumlah anggaran Rp. 55.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 23.466.967,- yang terealisasi keuangan sebesar 42,67% realisasi fisik sebesar 42,67% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
- b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
- f. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Tanjung Timur)

Jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 12.890.000,- yang terealisasi keuangan sebesar 21,48% realisasi fisik sebesar 21,48% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
 - b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
- g. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (Tanjab Barat)

Jumlah anggaran Rp. 1.540.535.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 23.122.500,- yang terealisasi keuangan sebesar 1,50% realisasi fisik sebesar 1,57% kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

 - a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
 - b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
- 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo)

Jumlah anggaran Rp. 370.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 223.647.870,- realisasi fisik 76,81%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

 - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah
- 5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin)

Jumlah anggaran Rp. 74.324.800,- yang terealisasi keuangan Rp. 436.000,- realisasi fisik sebesar 0,59%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

 - a. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah
- 6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 82.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 8.700.114,- realisasi fisik sebanyak 13,40%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah

7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Tanjab Barat)

Jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 0,- realisasi fisik sebanyak 0%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

8. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 1.229.058.960,- yang terealisasi keuangan Rp. 625.064.850,- realisasi fisik sebanyak 51,44%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya peningkatan frekuensi perlindungan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan.
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan
- d. Melaksanakan Penjagaan/ Pengamanan Gudang Barang Bukti

9. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 233.287.800,- yang terealisasi keuangan Rp. 30.238.943,- realisasi fisik sebanyak 12,96%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.

- b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .
10. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Bungo)
- Jumlah anggaran Rp. 370.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 223.647.870,- realisasi fisik sebanyak 76,81%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.
- Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
 - b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .
 - c. Pembayaran honorarium
11. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Merangin)
- Jumlah anggaran Rp. 486.505.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 201.801.500,- realisasi fisik sebanyak 42,71%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya rehabilitasi kawasan hutan yang di kelola.
- Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
 - b. Pelaksanaan patroli pemantauan kebakaran hutan.
 - c. Pembayaran honorarium
12. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hulu Sarolangun)
- Jumlah anggaran Rp. 219.246.800,- yang terealisasi keuangan Rp. 101.511.090,- realisasi fisik sebanyak 73,90%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar pemenuhan perlindungan penegahan kerusakan hutan.
- Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.

- b. Pelaksanaan patroli pemantauan kebakaran hutan.
- c. Pembayaran honorarium

13. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 279.119.500,- yang terealisasi keuangan Rp. 109.449.320,- realisasi fisik sebanyak 50,26%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 14 kali.

14. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tebo Barat)

Jumlah anggaran Rp. 104.729.920,- yang terealisasi keuangan Rp. 11.966.000,- realisasi fisik sebanyak 18,73%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan dan kebakaran sebanyak 7 kali.

15. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tebo Timur)

Jumlah anggaran Rp. 80.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 7.976.000,- realisasi fisik sebanyak 18,25%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan dan kebakaran sebanyak 7 kali.

16. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Batanghari)

Jumlah anggaran Rp. 219.139.500,- yang terealisasi keuangan Rp. 51.945.300,- realisasi fisik sebanyak 23,70%. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

17. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran Rp. 141.099.050,- yang terealisasi keuangan Rp. 44.376.687,- realisasi fisik sebanyak 49,59% . Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

18. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tanjab Timur)

Jumlah anggaran Rp. 256.065.375,- yang terealisasi keuangan Rp. 28.642.000,- realisasi fisik sebanyak 22,56%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

19. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tanjab Barat)

Jumlah anggaran Rp. 706.105.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 209.277.250,- realisasi fisik sebanyak 34,34%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 11 kali
- b. Pembayaran honorarium

20. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 131.444.760,- yang terealisasi keuangan Rp. 19.319.000,- realisasi fisik sebanyak 88,63%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terlaksananya pemanfaatan pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pembinaan terhadap KTH penerima bantuan alat ekonomi produktif.

21. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK (Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 98.013.200,- yang terealisasi keuangan Rp. 26.378.000,- realisasi fisik sebanyak 70,75%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

22. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun. (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 220.280.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 67.098.827,- realisasi fisik sebanyak 60,09%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar monitoring dan evaluasi rekonsiliasi pada pemegang izin.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
- b. Pembayaran honorarium

23. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun (Tebo Timur)

Jumlah anggaran Rp. 45.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 11.663.000, realisasi fisik sebanyak 25,92%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

b. Pembayaran honorarium

24. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun (Batanghari)

Jumlah anggaran Rp. 51.035.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 5.412.000,- realisasi fisik sebanyak 15,31%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya pembinaan pengolahan hasil hutan kayu. Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

25. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran Rp. 91.501.860,- yang terealisasi keuangan Rp. 23.848.600,- realisasi fisik sebanyak 48,61%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan hasil hutan kayu.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan monitoring izin yang ada di wilayah kelola UPTD.

26. Perbenihan Tanaman Hutan (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 88.885.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 50.320.253,- realisasi fisik sebanyak 56,61%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar pengada dan pengedar benih yang terdaftar.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pembayaran honorarium

III. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp.1.213.327.949,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mengoptimalkan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi. Realisasi keuangan atas

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 300.872.024,- atau sebesar 24,79% sedangkan fisik 40,32%.

1. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.

Jumlah anggaran Rp. 427.079.289,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 85.230.374,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pemeliharaan Kawasan
- b. Koleksi Tumbuhan

2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Jumlah anggaran Rp. 106.041.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 69.092.950,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan daerah penyangga.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi daerah penyangga kawasan suaka alam - kawasan pelestarian alam
- b. Survey satwa liar non appendix CITES

3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Jumlah anggaran Rp. 680.207.660,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 146.548.700,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga potensi yang dimiliki guna kelestarian sumber daya alam TAHURA.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan sosialisasi, pencegahan dan penanggulangan pembatasan kerusakan kawasan Tahura.

IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan.

Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp.1.056.961.722,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp.337.313.226,- atau sebesar 31,91% sedangkan fisik 31,33%.

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Jumlah anggaran Rp. 298.993.244,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 37.189.000,- Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pemeliharaan Kawasan
- b. Koleksi Tumbuhan

2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 132.927,420,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.873.443,- realisasi fisik 7,58%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS

3. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Bungo).

Jumlah anggaran Rp. 991.593.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 291.757.399,- realisasi fisik 31,76%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
 - c. Pembayaran Honorarium
4. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Merangin).
Jumlah anggaran Rp. 832.475.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 496.319.700,-, realisasi fisik 59,62%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.
Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
 - b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
 - c. Pembayaran Honorarium
5. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hulu Sarolangun).
Jumlah anggaran Rp. 79.576.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.427.500,-, realisasi fisik sebesar 28,05%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS Blue menjadi KUPS Silver.
Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
 - b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
 - c. Pembayaran Honorarium
6. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hilir Sarolangun).
Jumlah anggaran Rp. 260.503.500,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 85.048.620,-. Realisasi fisik 36,03%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan pemerdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.
Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
7. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Barat).

Jumlah anggaran Rp. 195.984.360,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 15.589.000,-. Realisasi fisik 19,36%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutan di Lingkup UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

8. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Timur).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 9.522.750,-. Realisasi fisik 18,01%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutandi Lingkup UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

b. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

9. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Batang Hari).

Jumlah anggaran Rp. 110.499.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.350.500,-. Realisasi fisik 7,56%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pendampingan kelembagaan KTH dan bina usaha kelola perhutanan sosial.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

10. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Muaro Jambi).

Jumlah anggaran Rp. 165.359.920,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 11.114.220,- realisasi fisik 18,99%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

11. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tanjung Jabung Timur).

Jumlah anggaran Rp. 99.856.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 9.440.000,-, realisasi fisik 23,02%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

b. Pembayaran Honorarium

12. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tanjung Jabung Barat).

Jumlah anggaran Rp. 234.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 54.550.390,-, realisasi fisik 23,26%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

b. Pembayaran Honorarium

V. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari 1 kegiatan .Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 90.730.800,- melalui dana APBD Provinsi Jambi, Realisai Keuangan Rp. 14.856.000 atau sebesar 16,37%, sedangkan realisasi fisik 19,24%.

a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

Jumlah anggaran Rp. 90.730.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 14.856.000,- Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud pengendalian pengelolaan DAS.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah
- c. Pembentukan kelembagaan persiapan Rehabiltasi DAS.

II. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Provinsi Jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi ;
 - Tata kesatuan pengelolaan hutan
 - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
 - Pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan)
 - Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
 - Pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi
 - Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi (kurang dari) $\leq 6000 \text{ M}^3 / \text{tahun}$ dan
 - Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi ,

- Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
 - Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- d. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan peberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
 - e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - f. Melaksanakan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan
 - g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bulan Januari s/d Juni Tahun 2023
Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Kehutanan									
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Program Pengelolaan Hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD	0,20		2.052.422.140	-	0,00	0,20		
		Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,58		6.246.069.116	-	0,00	1,58		

					Presentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83	-	5.138.526.060	-	0,00	0,83		
				Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengeloaan Hutan yang disusun	1					1		
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah identifikasi potensi pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	50		370.176.310	333.423.299	90,07	50		
				Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pemeliharaan dalam rangka rehabilitasi	24		179.695.356	137.296.956	76,41	24		
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan lahan.	0,83		1.228.358.950	1.153.761.250	93,93	0,83		

				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah lokasi pengecekan potensi HHBK dan pemegang izin HHBK yang di monitoring	20		32.790.000	28.879.000	88,07	20		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengeolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Frekuensi rekonsiliasi, sosialisasi dengan wajib bayar di kabupaten penghasil dan bintek untuk operator SIPNBP dan temu usaha	4 UPTD KPHP		120.860.720	107.470.720	88,92	4 UPTD KPHP		
				Kegiatan Perbenihan Tanaman	Persentase pengedar benih yang di fasilitasi	35		45.266.900	5.952.900	13,15	35		
UPTD KPHP Kerinci				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah pembinaan, monitoring, koordinasi dan sinergitas dengan instansi dan pemangku kepentingan	1 UNIT		115.000.000	100.294.680	87,21	1 UNIT		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelatihan Pengelolaan HHBK	6 KTH		991.095.350	754.585.950	76,14	6 KTH		
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Frekuensi patroli pemantauan dan pengamanan kebakaran hutan	0,83		65.838.000	54.469.000	82,73	0,83		

UPTD KPHP Bungo Unit II dan III				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	64,66	-	-	-	64,66		
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemetaan Potensi Sumber Daya Hutan	-	92.276.000	68.446.000	74,18	-		
				Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Lokasi Pengadaan Bibit Untuk Kegiatan Agroforestry	30 ha				30 ha		
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase pelaksanaan perlindungan hutan	4 Laporan	75.218.720	66.699.220	88,67	4 Laporan		
UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI				Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan	-	22.252.250	20.382.750	91,60	-		

				Hutan Konservasi (KPHK)								
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah pemegang izin dan pemanfaatan hutan yang di monitoring	35		22.252.250	20.382.750	91,60	35	
				Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kelompok yang dibina dan di fasilitasi sarana produksi (bibit)	4,58		991.095.350	754.585.950	76,14	4,58	
				Kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah patroli dan pengamanan pengendalian kebakaran hutan	32 Kali		69.611.993	68.683.600	98,67	32 Kali	
UPTD KPHP LIMAU UNIT VII Hulu Sarolangun				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi, monitoring, sinergitas izin peredaran hasil hutan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan hasil hutan yang berlaku	40		74.413.900	67.039.400	90,09	40	

				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase pemenuhan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	0,83		81.129.450	73.397.564	90,47	0,83		
				Kegiatan pelaksanaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Persentase pembinaan dan monitoring pada pemegang izin	3 KTH		19.601.250	18.556.000	94,67	3 KTH		
			UPTD KPHP LIMAU UNIT VIII Hilir Sarolangun	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi, monitoring ,pembinaan dan sinergitas dengan instansi dan pemangku kepentingan.	50		72.528.720	66.368.029	91,51	50		
				Kegiatan Pelaksanaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-					#DIV/0!			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-					#DIV/0!			
			UPTD KPHP Tebo Timur UNIT X	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah monitoring, sosialisasi dan pembinaan peredaran hasil hutan dan PNB	49		42.420.000	40.811.000	96,21	49		

			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun	Jumlah frekuensi pembinaan pada pemegang izin	47		29.018.500	25.218.500	86,90	47		
UPTD KPHP Muaro Jambi UNIT XIII			Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	0,83		274.086.970	248.047.421	90,50	0,83		
			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah monitoring, evaluasi dan sosialisasi perlindungan hutan	12 Kali		71.902.820	66.258.100	92,15	12 Kali		
			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun	Jumlah monitoring izin industri yang ada di wilayah kelola UPTD KPHP	60		87.767.940	87.184.940	99,34	60		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur UNIT XIV			Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	-		26.414.202	26.414.202	100,00	-		

				Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)									
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	47		39.460.000	35.795.000	90,71	47		
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan	0,83		113.485.800	101.884.450	89,78	0,83		
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	45		32.110.000	29.101.639	90,63	45		
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah patroli dan sosialisasi pengamanan dan perlindungan hutan	0,83		69.566.720	58.120.000	83,55	0,83		

				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan alat ekonomi produktif di UPTD KPHP	-		65.361.950	57.570.500	88,08	-		
			Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya			1.086.484.149	1.004.576.890	92,46			
				Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (AppSeEn,M diSx)I CITES (Convension On Internati)	Jumlah Lokasi Perlindungan Taman yang diKelola	11 UPTD KPHP		118.818.157	107.869.700	90,79	11 UPTD KPHP		
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan	Jumlah Lokasi Daerah Penyangga yang di Kelola	55		115.958.000	93.838.000	80,92	55		

				Kawasan Pelestarian Alam								
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Patroli Pengamanan di UPTD TAHURA	2 Lokasi		851.707.992	802.869.190	94,27	2 Lokasi	
				Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Presentase Luas Izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	20	1.582.288.810	1.405.869.181	88,85	20	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Konsultasi dengan Instansi Terkait	41,62		1.153.056.980	1.051.852.326	91,22	41,62	

UPTD KPHP Kerinci UNIT I	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dibina untuk peningkatan kelas	41,46		74.307.100	61.962.200	83,39	41,46		
UPTD KPHP Bungo UNIT II dan III	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatkan Produktifitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial	25,26		41.691.300	50.521.300	121,18	25,26		
UPTD KPHP Merangin UNIT IV, V DAN VI	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	18,25		22.600.000	22.600.000	100,00	18,25		
UPTD KPHP Limau UNIT VII Hulu Sarolangun	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	34,73		25.865.260	24.435.260	94,47	34,73		

UPTD KPHP Limau UNIT VII Hilir Sarolangun	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS pada masing-masing pemegang izin perhutanan sosial	32,65		49.506.500	48.701.500	98,37	32,65		
UPTD KPHP Tebo Barat UNIT IX	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan	27,85		15.052.095	11.713.895	77,82	27,85		
UPTD KPHP Tebo Timur UNIT X	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Kelas KUPS	27,85		32.226.200	12.731.000	39,51	27,85		
UPTD KPHP Batanghari UNIT XI dan XII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi terkait kegiatan Pengembangan Kelembagaan	27,85		28.616.920	22.476.000	78,54	27,85		

UPTD KPHP Muaro Jambi UNIT XIII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pembinaan Kepada KUPS/Kelompok Masyarakat Terhadap Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan	27,85		48.668.455	41.012.800	84,27	27,85		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur UNIT XIV	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	27,85		48.186.800	42.912.900	89,06	27,85		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat UNIT XV, VI dan XVII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan BIMTEK	27,85		42.511.200	14.950.000	35,17	27,85		
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	<i>Presentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk</i>	12		132.292.500	126.109.500	95,33	12		

				Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	8 UPTD dan 12 Kelompok		132.292.500	126.109.500	95,33	8 UPTD dan 12 Kelompok		
--	--	--	--	--	---	------------------------	--	-------------	-------------	-------	------------------------	--	--

Tabel-C30

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Provinsi Jambi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana	Dinas	65%	210.000.000	APBD		68%
					Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH						

Tabel-C31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Lembar.....Dari.....

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN										
				PROGRAM PENGELOLA AN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,20%	28.117.003.660	PROGRAM PENGELOLA AN HUTAN	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	28.117.003.660	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	1,58%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,58%	-	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,83%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83%	-	
					Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	65%	530.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	65%	530.000.000	

					Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	64,66%	620.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	64,66%	620.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	30%	520.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	30%	520.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	30%	530.000.000	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	30%	530.000.000	

					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	491.520.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	30%	491.520.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	30%	520.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	30%	520.000.000	

					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	Dinas Kehutanan	70%	700.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	70%	700.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	70%	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan	70%	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	70%	100.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Dinas Kehutanan	-	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	-	100.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau	Dinas Kehutanan	-	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII	-	50.000.000	

					Unit VII Hulu Sarolangun)						Hulu Sarolangun)			
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000			UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	-	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000			Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	70%	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	50.000.000			UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	70%	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000			Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	70%	50.000.000

					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Dinas Kehutanan	40%	150.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	40%	150.000.000	
					Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan	50%	2.413.449.240		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	50%	2.413.449.240	
					Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	UPTD KPHP Kerinci Unit I	7 Lokasi	147.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	7 Lokasi	147.000.000	
					Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	-	147.000.000	
					Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	35%	2.266.000.000	

					Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	187.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	40%	187.000.000	
					Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	805.340.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hulu Sarolangun)	50%	805.340.000	
					Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	11%	176.000.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	11%	176.000.000	
					Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	144.739.450		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	49%	144.739.450	
					Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	50%	142.033.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP Batanghari	50%	142.033.000	

					Batanghari Unit XI dan XII)					Unit XI dan XII)			
					Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	75.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	-	75.000.000
					Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	47%	185.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	47%	185.000.000
					Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.630.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	45%	1.630.000.000
					Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi		997.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	24%	997.000.000

					Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	478.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	478.000.000	
					Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58 %	570.500.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	4,58 %	570.500.000	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70 %	188.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	1,70 %	188.000.000	
					Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	240.200.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII Hilir Sarolangun)	30%	240.200.000	
					Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	641.500.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	30%	641.500.000	

					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	643.350.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	55%	643.350.000	
					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	600.500.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	55%	600.500.000	
					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	778.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	80%	778.000.000	
					Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	60%	448.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	60%	448.000.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	Dinas Kehutanan	0,83%	4.958.223.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	0,83%	4.958.223.000	

					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	928.654.250		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	0,83%	928.654.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	831.897.650		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	0,83%	831.897.650	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	981.444.250		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	0,83%	981.444.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	957.064.250		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	0,83%	957.064.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	838.322.500		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	0,83%	838.322.500	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	588.717.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	0,83%	588.717.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	482.400.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP	0,83%	482.400.000	

					Tebo Timur Unit X)					Tebo Timur Unit X)			
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	602.400.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	0,83%	602.400.000
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	680.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	0,83%	680.000.000
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	0,83%	997.112.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	0,83%	997.112.000
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	0,83%	1.241.297.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	0,83%	1.241.297.000
					Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	Dinas Kehutanan	20%	63.099.100		Dinas Kehutanan	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	20%	63.099.100
					Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH	137.500.000

					pemasaran HHBK									
					Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	3 KTH	105.000.000	
					Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	-	-	
					Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	45%	250.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	45%	250.000.000	
					Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Unit VIII Hilir sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Unit VIII Hilir sarolangun)	64%	218.294.340	

					Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	50%	45.000.000	
					Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	47%	61.455.000	
					Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	60%	100.000.000	
					Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas Kehutanan	35%	299.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	35%	299.000.000	
					Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	55%	1.985.000.000		UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang	55%	1.985.000.000	

					tidak dilindungi (UPTD Tahura)					tidak dilindungi (UPTD Tahura)			
					Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	Dinas Kehutanan	55%	300.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	55%	300.000.000
					Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas Kehutanan	55%	900.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	55%	900.000.000
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	Dinas Kehutanan	41,62 %	1.229.600.000		Dinas Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	41,62 %	1.229.600.000
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46 %	568.747.355		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	41,46 %	568.747.355

				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26 %	1.470.307.465		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	25,26 %	1.470.307.465	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45 %	1.542.963.865		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	31,45 %	1.542.963.865	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34,75 %	400.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	34,75 %	400.000.000	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65 %	1.312.134.400		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	32,65 %	1.312.134.400	

					Hilir Sarolangun)						Sarolangun)			
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85 %	680.000.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	27,85 %	680.000.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85 %	310.885.255		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	27,85 %	310.885.255	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85 %	322.000.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	27,85 %	322.000.000	

					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85 %	450.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	27,85 %	450.000.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	27,85 %	653.285.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	27,85 %	653.285.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	27,85 %	871.983.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	27,85 %	871.983.000	
					Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	Dinas Kehutanan	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000		Dinas Kehutanan	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000	

Tabel-C32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	
			Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,58%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83%	
			Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	65%	
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	64,66%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin IV, V dan VI	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	

			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	30%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	

			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	40%	
			Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	50%	
			Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	7 Lokasi	
			Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	
			Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	
			Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	

			Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	
			Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	11%	
			Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	
			Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	
			Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	
			Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	47%	
			Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	45%	
			Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	24%	
			Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	
			Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	
			Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	

			Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70%	
			Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	
			Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	
			Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	60%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Dinas)	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	

			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	0,83%	
			Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	20%	
			Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH	
			Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	
			Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	-	
			Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	45%	

			Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	
			Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	
			Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	
			Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	
			Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	35%	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%	
			Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UPTD Tahura	55%	
			Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	55%	
			Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	55%	

	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	20%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	41,62%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	41,62%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34,75%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65%	

			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	27,85%	
	PROGRAM PENGELOLAAN ALIRAN DAERAH SUNGAI (DAS)		Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	12%	
			Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	8 UPTD dan 12 Kelompok	

III. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Dalam mendukung Visi Kepala Daerah “Jambi MANTAP” Dinas Kehutanan Provinsi Jambi termasuk di Misi 2 yakni Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dimana tujuan yang ingin dicapai “Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dan juga sasaran jangka menengah dalam mendukung Jambi MANTAP terkait pembangunan Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yaitu :

1. Peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat
2. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
3. Peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla

IV. Rancangan RKPD

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 untuk Dinas Kehutanan tetap mengacu pada prioritas pembangunan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tata hutan Provinsi Jambi
- b. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
- c. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
- d. Monitoring dan fasilitasi PNBK dan PAD sektor kehutanan
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
- f. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
- g. Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
- h. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan
- i. Pengelolaan Taman Hutan Kenali sebagai wilayah konservasi flora endemik Jambi dan sebagai lokasi wisata alam
- j. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- k. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 merencanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konvensional (KPHK).
 3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara

5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 7. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000m³/Tahun.
 8. Perbenihan Tanaman Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan di Propinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Aspek terkait Penataan Ruang dan Kawasan* : Adanya konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dengan non-kehutanan menjadi muara masalah penataan ruang dan kawasan yang berakibatnya berupa tumpang tindih penggunaan kawasan yang ada.
2. *Aspek pemasaran produk Kehutanan*; Kesenjangan kapasitas industri dengan kemampuan menyediakan bahan baku industri sampai pada permasalahan persaingan harga yang tidak kompetitif antara produksi yang legal dengan bentuk izin lainnya.
3. *Illegal Logging dan kebakaran hutan*; Krisis multi dimensi yang berkepanjangan berdampak pada mata pencaharian masyarakat hingga peningkatan lahan kritis akibat rusaknya kawasan hutan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi menjamurnya Industri Primer Hasil Hutan dan izin lainnya serta belum maksimalnya peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan.
4. *Kualitas Hutan yang semakin menurun*; adanya illegal logging dan kebakaran hutan merupakan faktor kuat bagi penurunan kualitas dan potensi sumberdaya hutan.

5. *Masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;* Belum optimalnya pendekatan yang komprehensif serta menyentuh seluruh dimensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
6. *Sumber Daya Manusia Pengelola Hutan masih terbatas,* secara kuantitas jumlah polisi hutan, juru ukur, teknisi dan penyuluh kehutanan sangat terbatas, dan secara kualitas keterampilan dan kemampuannya harus ditingkatkan.
7. *Perubahan Iklim,* Isu perubahan iklim *saat ini sangat penting dimana Provinsi Jambi adalah termasuk daerah rawan bencana yang di timbulkan oleh alam misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.*

Langkah strategis yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan : melalui pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan multipihak (adat, tomas, polri, TNI, Instansi terkait), sosialisasi / penyebarluasan hasil tata batas kawasan hutan melalui pendampingan/ penyuluhan.
2. Percepatan Pembangunan HTR, HD dan kemitraan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan.
3. Kampanye menanam dan pemberian bibit tanaman kehutanan disetiap even kegiatan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat guna merehabilitasi kawasan hutan.
4. Patroli Terpadu (pengamanan dan menanam tanaman kehutanan) ; Peningkatan SDM Polhut, Sarpras dan pendanaan pengamanan hutan di daerah serta penyuluhan/ sosialisasi penegakan hukum.
5. Meningkatkan pelayanan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan ; Peningkatan usaha Hutan Tanaman, Hutan Alam dan Hutan Rakyat, fasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

6. Mengantisipasi dampak dari perubahan iklim sedini mungkin dengan cara memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7. Bekerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Rehabilitasi Hutan dan peningkatan ekonomi sekitar hutan

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/ kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Pada tahun 2023 terdapat sejumlah kegiatan yang memberi nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023 mencakup **17 Kegiatan** dalam **5 Program**. Ikhtisar program dan kegiatan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kebijakan 1

“Pengelolaan Hutan”

Program Pengelolaan Hutan kegiatan terdiri dari:

- a. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- b. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- g. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m³/Tahun
- h. Perbenihan Tanaman Hutan

Kebijakan 2

“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan terdiri dari :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kebijakan 3**“Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan”**

Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Kebijakan 4**“Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”**

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah provinsi.

Tabel-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							LOKASI	Target	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(11)	(12)	(19)
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan Prov. Jambi		106,650,796,072	Dinas dan UPTD			103,212,205,202	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	28	03			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	80%	67,375,794,072	Dinas dan UPTD		80%	69,041,378,202	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi	Subbag Program dan Evaluasi	100%	454,828,000	Dinas dan UPTD		100%	460,234,000	Subbag Program dan Evaluasi
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Perangkat Daerah	Subbag Program dan evaluasi	100%	242,000,000	APBD		100%	242,000,000	Subbag Program dan evaluasi
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban	Subbag Program dan evaluasi	100%	68,000,000	APBD		100%	68,000,000	Subbag Program dan evaluasi
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan monitoring evaluasi dan update data kehutanan	Subbag Program dan evaluasi	100%	90,000,000	APBD		100%	90,000,000	Subbag Program dan evaluasi
						Jumlah Dukungan Operasional Fasilitas Kelembagaan (Tingkat Provinsi)	Subbag Program dan evaluasi	1 Paket	54,828,000	BioCF/APBD		1 Paket	60,234,000	Subbag Program dan evaluasi
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan	Subbag Keuangan dan Aset	100%	57,263,328,722	Dinas dan UPTD		100%	58,417,064,602	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Subbag Keuangan dan Aset	100%	56,657,566,000	APBD		100%	57,790,717,320	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Subbag Keuangan dan Aset	100%	485,178,822	APBD		100%	499,734,187	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.02	04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah hasil pemeriksaan yang ditanggapi	Subbag Keuangan dan Aset	2 kali	10,000,000	APBD		2 kali	10,500,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan laporan keuangan berkala dan tahunan	Subbag Keuangan dan Aset	100%	110,583,900	APBD		100%	116,113,095	Subbag Keuangan dan Aset

3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat SKPD	Persentase Penyiapan Administrasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban BMD	Subbag Keuangan dan Aset	100%	479,880,000	Dinas dan UPTD		100%	661,436,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengawasan Pemanfaatan BMD	Subbag Keuangan dan Aset	90%	130,000,000	APBD		92%	130,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
						Persentase Penyiapan Administrasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban BMD	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD		-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang di amankan	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD		70%	98,438,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Subbag Keuangan dan Aset	22 Kali	192,500,000	APBD		22 Kali	202,125,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	Subbag Keuangan dan Aset	2 kali	157,380,000	APBD		2 kali	165,248,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Penatausahaan BMD	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD		60%	65,625,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pendapatan daerah	Subbag Keuangan dan Aset	100%	100,000,000	Dinas dan UPTD		100%	100,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Promosi Objek Retribusi	Subbag Keuangan dan Aset	1 Kali	75,000,000	APBD		1 Kali	75,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Retribusi yang dilaporkan	Subbag Keuangan dan Aset	100%	25,000,000	APBD		100%	25,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian	75%	185,000,000	Dinas dan UPTD		80%	569,550,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan dan Kelengkapan Pakaian Dinas	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	APBD		100%	381,550,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	15,000,000	APBD		100%	16,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian	87%	15,000,000	APBD		90%	16,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	75,000,000	APBD		100%	75,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase fasilitasi ASN mengikuti diklat formal	Subbag Umum dan Kepegawaian	70%	80,000,000	APBD		70%	80,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas)	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	849,710,000	Dinas dan UPTD		100%	905,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	17,210,000	APBD		100%	19,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat perlengkapan kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	350,000,000	APBD		100%	380,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan alat rumah tangga	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	APBD		100%	8,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	81,500,000	APBD		100%	89,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	15,500,000	APBD		100%	17,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian

3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	15,500,000	APBD		100%	16,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	305,000,000	APBD		100%	310,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penertiban pengarsipan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	40%	65,000,000	APBD		50%	65,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	357,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I		100%	236,250,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	3,500,000	APBD		100%	4,250,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	20,000,000	APBD		100%	23,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Persentase penyediaan mobiler kantor (2 resort dan kantor Tanjung Pauh)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	186,000,000	APBD		100%	71,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Persentase penyediaan mobiler kantor (kantor baru sungai penuh)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	25,000,000	APBD		100%	15,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Persentase penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	3,000,000	APBD		100%	3,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	4,500,000	APBD		100%	5,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	5,000,000	APBD		100%	5,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	10,000,000	APBD		100%	10,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	157,500,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III		100%	155,300,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	3,500,000	APBD		100%	4,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	30,000,000	APBD		100%	27,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	1,500,000	APBD		100%	1,500,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	2,500,000	APBD		100%	2,800,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	100%	172,500,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		100%	172,500,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	5,000,000	APBD		1 Paket	5,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	25,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	35,000,000	APBD		1 Paket	35,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	2,500,000	APBD		1 Paket	2,500,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	5,000,000	APBD		1 Paket	5,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	145,300,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		100%	146,800,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	3,500,000	APBD		100%	5,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	15,000,000	APBD		100%	15,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan\	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	1,800,000	APBD		100%	1,800,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan komsumsi tamu	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	5,000,000	APBD		100%	5,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	157,500,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		100%	160,400,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan komponen instalasi listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	3,500,000	APBD		100%	4,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan peralatan kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	20,000,000	APBD		100%	22,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan barang cetakan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan bahan bacaan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	1,500,000	APBD		100%	1,700,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan kunjungan tamu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	2,500,000	APBD		100%	2,700,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional rapat kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	157,500,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX		100%	156,926,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	3,500,000	APBD		100%	2,102,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	1,500,000	APBD		100%	1,560,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	2,500,000	APBD		100%	3,264,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Tebo Timur)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	157,500,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		100%	158,324,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	3,500,000	APBD		100%	3,500,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	1,500,000	APBD		100%	1,560,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	2,500,000	APBD		100%	3,264,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	155,200,000	Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI		100%	155,200,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI

3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	3,500,000	APBD		100%	3,500,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	27,000,000	APBD		100%	27,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	2,200,000	APBD		100%	2,200,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	2,500,000	APBD		100%	2,500,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	208,250,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		100%	206,102,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	4,250,000	APBD		100%	2,102,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	70,000,000	APBD		100%	70,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	1,500,000	APBD		100%	1,500,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	2,500,000	APBD		100%	2,500,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	155,200,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		100%	155,200,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	3,500,000	APBD		100%	3,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	27,000,000	APBD		100%	27,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	2,200,000	APBD		100%	2,200,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	2,500,000	APBD		100%	2,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase fasilitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	156,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		100%	156,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	3,500,000	APBD		100%	3,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	27,000,000	APBD		100%	27,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitas bahan bacaan dan referensi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	1,500,000	APBD		100%	1,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	4,500,000	APBD		100%	4,500,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas rapat dan koordinasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (TAHURA)	Persentase fasilitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	182,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)		100%	197,500,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	5,000,000	APBD		100%	5,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	40,000,000	APBD		100%	50,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)

3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	30,000,000	APBD		100%	35,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	3,500,000	APBD		100%	3,500,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi tamu	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	3,500,000	APBD		100%	4,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD untuk Menunjang Operasional	Subbag Keuangan dan Aset	80%	1,978,185,000	Dinas dan UPTD		80%	2,018,593,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Subbag Keuangan dan Aset	1 Unit	500,000,000	APBD		1 Unit	500,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan (roda 2,3)	Subbag Keuangan dan Aset	9 Unit	-	BioCF & DBH-DR		10 Unit	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Tamu Pejabat yang diadakan	Subbag Keuangan dan Aset	2 Set	70,000,000	APBD		2 Set	70,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	20 Unit	-	BioCF & DBH-DR		7 unit	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terpenuhinya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Subbag Keuangan dan Aset	2 unit	1,575,000	APBD		2 unit	1,653,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan/bangun	Subbag Keuangan dan Aset	2 unit	787,500,000	APBD		2 unit	826,875,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	20 unit	600,000,000	APBD		20 unit	600,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	260 meter	19,110,000	APBD		260 meter	20,065,000	Subbag Keuangan dan Aset
						Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD		-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD untuk Menunjang Operasional	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	Dinas dan UPTD		-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD/BioCF		-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD untuk Menunjang Operasional	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	Dinas dan UPTD		-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD/BioCF		-	-	Subbag Keuangan dan Aset

3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	1,227,500,000	Dinas dan UPTD		100%	1,259,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kehutanan)	Persentase fasilitasi surat menyurat	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	42,500,000	APBD		100%	46,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kehutanan)	Persentase pemenuhan pembayaran tagihan listrik, air dan telekomunikasi dan pemasangan baru	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	550,000,000	APBD		100%	550,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kehutanan)	Persentase Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	275,000,000	APBD		100%	302,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	100%	360,000,000	APBD		100%	360,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	36,369,600	Dinas dan UPTD		100%	36,369,600	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Kerinci Unit I	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan kenyamanan kondisi kantor	UPTD KPHP Kerinci Unit I	100%	36,369,600	APBD		100%	36,369,600	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	129,000,000	BioCF		100%	129,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Bungo Unit I)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Jumlah Hari Penyewaan kendaraan operasional roda 4 (empat)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	90 Hari	76,500,000	BioCF		90 Hari	76,500,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						BBM Dexlite	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2045 Hari	22,500,000	BioCF		2045 Hari	22,500,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	100%	120,000,000	BioCF		100%	120,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Jumlah kendaraan operasional yang disewa	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Unit	90,000,000	BioCF		1 Unit	90,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	100%	30,000,000	BioCF		100%	30,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	145,000,000	BioCF		100%	120,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Jumlah kendaraan operasional yang disewa	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Unit	90,000,000	BioCF		1 Unit	90,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Pengadaan Reservoir Portable	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	5 Unit	25,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	100%	30,000,000	BioCF		100%	30,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	30,000,000	Dinas dan UPTD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	150,000,000	BioCF		100%	150,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kendaraan operasional yang disewa	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Unit	120,000,000	BioCF		1 Unit	120,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	30,000,000	BioCF		100%	30,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD TAHURA)	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	-	-	APBD		-	-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD TAHURA)	Persentase fasilitasi surat menyurat	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)		-	APBD			-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD TAHURA)	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	-	-	APBD		-	-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	Subbag Keuangan dan Aset	78%	1,755,042,750	APBD		80%	1,698,129,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dibiayai perawatan dan tagihan pajak	Subbag Keuangan dan Aset	23 Unit	1,000,000,000	APBD		23 Unit	1,000,000,000	Subbag Keuangan dan Aset

3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	APBD	-	-	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel yang diperbaiki	Subbag Keuangan dan Aset	100 Unit	150,000,000	APBD	100 Unit	150,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Subbag Keuangan dan Aset	171 Unit	150,000,000	APBD	192 Unit	150,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Subbag Keuangan dan Aset	43 Unit	21,500,000	APBD	46 Unit	23,000,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Subbag Keuangan dan Aset	100%	7,812,000	APBD	100%	9,765,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Subbag Keuangan dan Aset	3 Unit	329,271,000	APBD	3 Unit	329,271,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Subbag Keuangan dan Aset	3 Unit	96,459,750	APBD	3 Unit	36,093,000	Subbag Keuangan dan Aset
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	78%	160,000,000	APBD	80%	160,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	UPTD KPHP Kerinci Unit I	2 Unit	160,000,000	APBD	2 Unit	160,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0.20%	28,117,003,660	APBD	0.20%	22,466,616,715	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
						Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	1.58%	-	APBD	1.71%	-	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
						Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0.83%	-	APBD	0.83%	-	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	65%	210,000,000	APBD	68%	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana survey dan pemetaan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Unit	50,000,000	APBD	1 Unit	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Unit	50,000,000	APBD	1 Unit	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I

	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	64.66%	300,000,000	Dinas Kehutanan		-	50,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2 Unit	50,000,000	APBD		2 Unit	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pengadaan GPS	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah paket pengadaan meja, kursi dan lemari kantor untuk kantor KPHP, kantor resort dan pos jaga	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Paket	100,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Pengadaan Drone	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	30%	200,000,000	Dinas Kehutanan		40%	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Unit	50,000,000	APBD		2 Unit	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional di Resort	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		40%	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	210,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		40%	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		40%	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		40%	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Jumlah tersusunnya perencanaan rancang bangun tata hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	2 dokumen	50,000,000	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah terhimpunnya data potensi wilayah tertentu dan areal Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah pelaksanaan rekonstruksi tanda batas wilayah KPH	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemantapan Kawasan Hutan dan Rekonstruksi tanda Batas	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	1 Unit	50,000,000	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	1 Unit	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	1 Dokumen	60,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		40%		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Dokumen	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan KPH	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Unit	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Unit	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Dokumen	60,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	30%	210,000,000	Dinas Kehutanan		40%		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Dokumen	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Unit	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Unit	50,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Dokumen	60,000,000	APBD		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	30%	200,000,000	Dinas Kehutanan		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Dokumen	50,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian Blok	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Unit	50,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Unit	50,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Dokumen	50,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	Dinas Kehutanan	70%	100,000,000	Dinas Kehutanan	75%	-	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dinas)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	Bidang PPH	1 Dokumen	100,000,000	APBD	-	-	Bidang PPH
						Jumlah dokumen RKTP (Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi) Jambi yang disusun	Dinas Kehutanan	-	-	BioCF	-	-	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	70%	50,000,000	Dinas Kehutanan	75%	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Dokumen	50,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	70%	40,000,000	Dinas Kehutanan	75%	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.02	01	Penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2 Dokumen	40,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	50,000,000	Dinas Kehutanan	-	20,770,393	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.02	01	Penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	20,770,393	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	Dinas Kehutanan		75%	50,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		-	50,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	70%	50,000,000	Dinas Kehutanan		75%	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
						Jumlah legalitas perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
						Jumlah tata batas terluar pada areal perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	50,000,000	Dinas Kehutanan		75%	50,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	70%	50,000,000	Dinas Kehutanan		75%	50,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	40%	80,000,000	Dinas Kehutanan		45%	80,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	3 Dokumen	80,000,000	APBD		3 Dokumen	80,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan	Dinas Kehutanan	50%	2,243,449,240	Dinas Kehutanan		50%	1,313,999,100	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	Bidang PPH	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Kegiatan	50,000,000	Bidang PPH
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi mengenai pemanfaatan hutan di kawasan HL Provinsi secara Berkala	Bidang PPH	2 Dokumen	80,000,000	APBD		2 Dokumen	80,000,000	Bidang PPH
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Bidang PPH	10 Dokumen	102,779,000	APBD		10 Dokumen	107,918,000	Bidang PPH
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan produksi yang disahkan	Bidang PPH	4 Dokumen	107,785,000	APBD		4 Dokumen	113,174,000	Bidang PPH
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Penyusunan Rancangan Teknis Penanaman Tanaman Endemik di KEE Pantai Cemara	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Penanaman tanaman endemik (3 Ha * 400 btg)	BIDANG PDAS-RHL	3 Ha	22,259,070	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Pemeliharaan Tanaman Endemik I	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		3 Ha	7,524,600	BIDANG PDAS-RHL
						Pemeliharaan Tanaman Endemik II	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Rantek Rehabilitasi Gambut	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Rehabilitasi Gambut	BIDANG PDAS-RHL	10 Ha	156,947,800	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Pemeliharaan I	BIDANG PDAS-RHL	15 Ha	77,107,500	BioCF		10 Ha	51,405,000	BIDANG PDAS-RHL
						Pemeliharaan II	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		15 Ha	43,912,500	BIDANG PDAS-RHL
						Persiapan Desain Teknis	BIDANG PDAS-RHL	135 Ha	55,620,000	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
						Reboisasi Agroforestri	BIDANG PDAS-RHL	135 Ha	1,001,658,150	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL

						Pemeliharaan Agroforestri I	BIDANG PDAS-RHL	135 Ha	338,607,000	BioCF		135 Ha	338,607,000	BIDANG PDAS-RHL
						Pemeliharaan Agroforestri II	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		135 Ha	271,458,000	BIDANG PDAS-RHL
						Honorarium PTT	BIDANG PDAS-RHL	-	-	BioCF		-	-	BIDANG PDAS-RHL
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyelesaian piutang macet	Bidang PPH	9 Kab dan 2 Kota	250,685,720	APBD		9 Kab dan 2 Kota	250,000,000	Bidang PPH
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	UPTD KPHP Kerinci Unit I	7 Lokasi	147,000,000	APBD		8 Lokasi	186,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Kerinci Unit I	5 Lokasi	75,000,000	APBD		6 Lokasi	90,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 Kali	72,000,000	APBD		8 Kali	96,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III		-	186,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	5 Lokasi	75,000,000	APBD		6 Lokasi	90,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pemetaan Potensi Sumber Daya Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	6 Kali	72,000,000	APBD		8 Kali	96,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2,266,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		40%	2,072,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Dokumen	75,000,000	APBD		6 Dokumen	90,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pemetaan dan distribusi potensi Agroforestry Aren dan Kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) untuk rehabilitasi hutan Kegiatan Kemitraan Konservasi untuk Melestarikan sebagian besar Hutan yang tersisa di Jambi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4 Paket	16,000,000	BioCF	8 Paket	32,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Luas pelaksanaan Penanaman (reboisasi dan penghijauan) Kegiatan Mengembangkan Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	200 Ha	1,800,000,000	BioCF	150 Ha	1,350,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Luas Pemeliharaan Tanaman Kegiatan Mengembangkan Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	125 Ha	375,000,000	BioCF	200 Ha	600,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	148,482,100	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	50%	130,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	BioCF	-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Dokumen	50,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	4 kali	98,482,100	APBD	5 kali	80,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Fasilitasi Kemitraan			-			-	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	830,340,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	55%	220,300,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	100,000,000	APBD	6 Dokumen	90,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	3	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (HLN/BioCF)	Jumlah Penyusunan Rancangan Teknis RHL	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	16,480,000	BioCF	1 Dokumen	4,120,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

						Luas Penanaman	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	40 Ha	503,560,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Luas Pemeliharaan tahun I	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50 Ha	210,300,000	BioCF		30 Ha	126,180,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	11%	300,000,000	Wilayah UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	11%	131,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.03	01		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.03	01		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Dokumen	100,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	7 Izin	100,000,000	APBD	10 Izin	31,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
							Jumlah pemantauan dan pembinaan pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	7 Izin	100,000,000	APBD	7 Izin	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.03	09		Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pendataan Pemanfaatan HHK, HHBK dan/atau Jasa Lingkungan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	169,739,450	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	130,200,368	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.03	01		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.03	01		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Dokumen	100,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	15 Kali	69,739,450	APBD	17 Kali	80,200,368	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	167,033,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	53%	122,033,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI & XII)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	1 Dokumen	100,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	4 Izin	67,033,000	APBD	4 Izin	72,033,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
						Jumlah pelaksanaan monitoring dan pemantauan perizinan pada kawasan hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
						Jumlah pelaksanaan fasilitasi PNPB dan kerjasama/kemitraan kehutanan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.03		Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	320,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	50,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Dokumen	100,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Luas rehabilitasi hutan di KPH	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	20 Ha	220,000,000	APBD	-	-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	47%	235,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	48%	261,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Inventarisasi Potensi Jasling dan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Inventarisasi Okupasi dan Perambahan pada Blok Pemberdayaan Hutan Lindung	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Inventarisasi Okupasi dan Perambahan pada Blok Pemberdayaan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Dokumen	75,000,000	APBD		6 Dokumen	90,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Izin	110,000,000	APBD		1 Izin	121,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan lindung	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pengawasan pada Izin HD	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pengawasan pada Pemegang Izin	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan pada izin IUPHHK-HTI	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1,655,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		47%	998,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Dokumen	50,000,000	APBD		6 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Dokumen	50,000,000	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (BioCF)	Jumlah luas kawasan hutan yang direhabilitasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	40 Ha	688,519,200	BioCF		5,5 Ha	94,671,390	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Persentase Pemeliharaan Tahun 1 (P I)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	100%	770,130,000	BioCF		100%	250,780,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Persentase Pemeliharaan Tahun 2 (P II)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	BioCF		100%	484,653,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

						Monitoring dan evaluasi RHL	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Paket	4,350,800	BioCF		1 Paket	5,895,610	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan /Jasa Lingkungan	Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif dan Pengembangan Bisnis HHBK dan Jasling	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Paket	92,000,000	BioCF		1 Paket	112,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan	Dinas Kehutanan	24%	475,000,000	Dinas Kehutanan		25%	605,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	Bidang PDAS RHL	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	Bidang PDAS RHL	10 Ha	100,000,000	APBD		-	110,000,000	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihiijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bidang PDAS RHL	-	-	APBD		10 ha	120,000,000	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun	Bidang PDAS RHL	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	Bidang PDAS RHL	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Bidang PDAS RHL	4 Laporan	-	APBD		4 Laporan	-	Bidang PDAS RHL
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi	Bidang PDAS RHL	120 Kali	225,000,000	BioCF & APBD		120 Kali	225,000,000	Bidang PDAS RHL
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	652,100,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I		50 Ha	420,900,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Kerinci Unit I	25 Ha	224,100,000	APBD		25 Ha	224,100,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihiijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Kerinci Unit I	10 Ha	120,000,000	APBD		-	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Unit	120,000,000	APBD		-	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	778,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III		10 Ha	586,800,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	100,000,000	APBD	-	100,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	100,000,000	APBD	-	100,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihiijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	10 Ha	120,000,000	APBD	10 Ha	120,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pengadaan dan penanaman bibit kayu untuk naungan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	500 Batang	25,000,000	BioCF	500 Batang	25,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pengadaan bibit kopi untuk kegiatan agroforestry	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	10.252 Batang	100,000,000	BioCF	-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pengadaan bibit aren untuk kegiatan agroforestry	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2.400 batang	100,000,000	BioCF	-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Unit	-	APBD	1 Unit	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pembangunan Kebun Bibit Kehutanan dan MPTS untuk Penyediaan Kebutuhan Bibit Rehabilitasi (2 unit)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	15.000 Batang	125,000,000	BioCF	15.000 Batang	125,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	4 Laporan	88,000,000	APBD	4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	16 kali	20,000,000	BioCF	16 kali	20,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4.58%	180,500,000	APBD	5.91%	241,800,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihiijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Unit	-	APBD	1 Unit	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Pengembangan Pembibitan Tanaman Hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 unit	50,000,000	BioCF/APBD	2 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

						Jumlah Pengadaan dan penanaman bibit kayu untuk naungan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	10 unit	20,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Monitoring & evaluasi kegiatan rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	3 Paket	22,500,000	BioCF		6 Paket	45,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1.70%	188,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		1.90%	406,800,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		1 Dokumen	160,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		5 Ha	50,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang di hijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	240,200,000	APBD		30%	178,900,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (APBD)	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pengadaan Bibit Kayu Untuk Naungan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	18,040	82,000,000	BioCF		15,840	72,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 unit	50,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

						Jumlah Monitoring dan evaluasi RHL	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	7 Kali	20,200,000	BioCF		3 Kali	10,100,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	333,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	25%	341,800,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04	01		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04	02		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	5 Ha	125,000,000	APBD	5 Ha	125,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04	04		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihijsaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04	06		Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 Unit	120,000,000	APBD	1 Unit	120,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04	08		Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	4 Laporan	88,000,000	APBD	4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	188,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	60%	196,800,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04	01		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04	02		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04	04		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihijsaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04	06		Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	1 Unit	100,000,000	APBD	1 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04	08		Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	4 Laporan	88,000,000	APBD	4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	55%	360,500,000	Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	60%	395,175,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.04	01		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.04	02		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	10 Ha	172,500,000	APBD	10 Ha	198,375,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.04	04		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihijsaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	-	-	APBD	-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI

3	28	3	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	338,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		80%	346,800,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 lokasi 10 Ha	150,000,000	APBD		1 lokasi 10 Ha	150,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang di hijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Tersedianya sumber benih untuk kegiatan rehabilitasi di KPH	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	47%	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.04	01	Pengembangan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Penanaman Pohon Pada area Publik dan Turus Jalan di Kawasan terpadu Mandiri (KTM)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Lokasi	-	APBD		1 Lokasi	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	60%	208,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		70%	216,800,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang di hijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit yang dikelola	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

						Penyediaan bibit yang berkualitas	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Paket	20,000,000	BioCF		1 Paket	20,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	4 Laporan	88,000,000	APBD		4 Laporan	96,800,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Dinas Kehutanan	0.83%	4,076,542,530	Dinas Kehutanan		0.83%	3,395,893,100	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan	Bidang PKSDAE	24 Kali	150,000,000	APBD		24 Kali	150,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah Patroli Rutin dan Patroli Masyarakat	Bidang PKSDAE	15 Kali	198,000,000	BioCF		15 Kali	198,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah Pemantauan Berkala oleh Pemegang Izin untuk Pelaksanaan HCV dan HCS	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		10 Kali	132,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah Operasi Gabungan dan Penegakkan Hukum	Bidang PKSDAE	1 Kali	152,000,000	BioCF		1 Kali	152,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah pengamanan peredaran hasil hutan	Bidang PKSDAE	5 Kali	66,000,000	BioCF		5 Kali	66,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Bidang PKSDAE	36 Kali	200,000,000	APBD		38 Kali	200,000,000	Bidang PKSDAE
						Sosialisasi Hutan dan Perlindungan Hutan	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		6 Kali	120,000,000	Bidang PKSDAE
						Pendidikan/ Kesadaran Tentang Studi Program	Bidang PKSDAE	5 Paket	66,075,000	BioCF		2 Paket	26,430,000	Bidang PKSDAE
						Sosialisasi KEE	Bidang PKSDAE	1 Kali	21,030,000	BioCF		1 Kali	21,030,000	Bidang PKSDAE
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	Bidang PKSDAE	34 Kali	200,000,000	APBD		36 Kali	200,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Bidang PKSDAE	1 Kali	150,000,000	APBD		1 Kali	156,000,000	Bidang PKSDAE
						Sosialisasi Hutan dan Perlindungan Hutan	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		6 Kali	120,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Perlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Bidang PKSDAE	150 Kali (prediksi El Nino)	1,852,562,530	APBD		76 Kali	1,004,558,100	Bidang PKSDAE
						Pengembangan Peraturan Kabupaten/Kota tentang Penanggulangan Kebakaran	Bidang PKSDAE	1 Paket	151,875,000	BioCF		1 Paket	151,875,000	Bidang PKSDAE
						Penyusunan Pergub tentang Moratorium Gambut, Naskah Akademik dan SOP Pelaksanaan	Dinas Kehutanan	1 Dokumen	155,000,000	BioCF		-	-	Dinas Kehutanan
						Jumlah Pembasahan Gambut pada Musim Kemarau	Bidang PKSDAE	40 kali	300,000,000	BioCF		40 kali	300,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah Pembangunan Pos Jaga	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		1 Unit	200,000,000	Bidang PKSDAE

						Pengadaan dan Pemasangan Papan Larangan	Bidang PKSDAE	30 Unit	150,000,000	BioCF		-	-	Bidang PKSDAE
						Jumlah Pelatihan untuk Kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api)	Bidang PKSDAE	4 Kelompok	264,000,000	BioCF		3 Kelompok	198,000,000	Bidang PKSDAE
						Jumlah Pengadaan Waduk Portable	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		-	-	Bidang PKSDAE
						Jumlah Paket Pemadam Kebakaran	Bidang PKSDAE	-	-	BioCF		-	-	Bidang PKSDAE
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0.83%	729,174,250	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0.83%	761,356,963	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05	01		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	14 Kali	50,000,000	APBD	14 Kali	50,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05	02		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	25 Kali	85,980,000	APBD	25 Kali	101,578,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah patroli pemantauan kebakaran	UPTD KPHP Kerinci Unit I	21 Kali	31,500,000	APBD	20 Kali	30,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah sekolah lapang PLTB	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Kali	70,000,000	APBD	1 Kali	70,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05	03		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	15 Operasi	100,000,000	APBD	15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	1 Kali	150,000,000	APBD	1 Kali	156,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05	05		Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah laporan patroli / sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	8 kali	26,444,250	APBD	8 kali	27,766,463	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah training dan pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	2 MPA	36,448,860	APBD	2 MPA	38,271,303	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	2 kali	26,077,590	APBD	2 kali	27,381,470	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah pengendalian/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	45 hari	40,746,300	APBD	45 hari	42,783,615	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah patroli pencegahan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	48 kali	85,533,000	APBD	48 kali	89,809,650	UPTD KPHP Kerinci Unit I
							Jumlah koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	8 kali	26,444,250	APBD	8 kali	27,766,463	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0.83%	706,897,650	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0.83%	575,664,463	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.05	01		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (patroli reguler dan Patroli Komunitas)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	12 kali	21,120,000	BioCF/APBD	12 kali	21,120,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

						Frekwensi Pengawasan berkala kepada pemegang izin terhadap implementasi perlindungan areal HCV (High Conservation Value dan HCS (High Conservation Stock))(UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	10 kali	13,200,000	BioCF/APBD		10 kali	13,200,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25 Kali	155,980,000	APBD		25 Kali	145,148,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah sosialisasi kesadaran Publik Tentang Penyebaran Hutan dan Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Kali	20,000,000	BioCF/APBD		1 Kali	20,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pendidikan (pelatihan) mengenai Perlindungan hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF/APBD		5 kali	26,430,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Kali	150,000,000	APBD		1 Kali	156,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan patroli / sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	8 kali	26,444,250	APBD		8 kali	27,766,463	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pembangunan Pos Penjagaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Unit	64,153,400	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) yang dilatih	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	3 kali	66,000,000	BioCF/APBD		3 kali	66,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah paket pengadaan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Paket	90,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pengadaan kendaraan patroli roda 2	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0.83%	862,424,250	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		0.83%	798,914,463	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 kali	20,000,000	BioCF/APBD		3 kali	30,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

						Jumlah pelaksanaan Pengawasan berkala pemegang izin atas pelaksanaan perlindungan kawasan HCV dan HCS	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 kali	20,000,000	BioCF/APBD		3 kali	30,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah penyelenggaraan Patroli Reguler dan Patroli Komunitas	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	10 kali	100,000,000	BioCF/APBD		5 kali	50,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah penyelenggaraan Patroli Gabungan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Kali	50,000,000	BioCF/APBD		2 Kali	50,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	25 Kali	155,980,000	APBD		25 Kali	145,148,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Frekuensi Sosialisasi Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	10 kali	150,000,000	BioCF/APBD		9 kali	135,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Kali	150,000,000	APBD		1 Kali	156,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan patroli / sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	8 kali	26,444,250	APBD		8 kali	27,766,463	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Pelatihan untuk kelompok MPA (Fire Concerned Community)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 kali	30,000,000	BioCF/APBD		1 kali	75,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Pelatihan untuk MMP	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 paket	60,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0.83%	628,944,250	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		0.83%	630,266,463	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patroli pengamaman hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	14 Kali	50,000,000	APBD		14 Kali	50,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	10 kali	100,000,000	BioCF/APBD		9 kali	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1 Kali	100,000,000	APBD		1 Kali	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun

3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan patroli / sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	8 kali	26,444,250	APBD		8 kali	27,766,463	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	2 Kelompok	35,000,000	APBD		1 Kelompok	35,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	45 Hari	157,500,000	APBD		45 Hari	157,500,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	6 Kali	60,000,000	APBD		6 Kali	60,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0.83%	713,322,500	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		0.83%	495,851,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	10 kali	84,397,000	APBD		10 kali	86,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Pengawasan berkala pemegang izin atas pelaksanaan perlindungan kawasan HCV dan HCS	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 kali	13,200,000	APBD		1 kali	13,200,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Patroli rutin dan Patroli komunitas	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	9 kali	118,800,000	BioCF/APBD		9 kali	118,800,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Operasi gabungan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 kali	20,000,000	BioCF/APBD		1 kali	20,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Kali	150,000,000	APBD		1 Kali	156,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Paket Pengadaan alat pemadam kebakaran	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 paket	90,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

						Jumlah Pembangunan pos penjagaan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Pelatihan kelompok MPA	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 kali	66,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 Unit	70,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah papan larangan di kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 unit	925,500	BioCF/APBD		2 unit	1,851,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0.83%	381,797,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX		0.83%	383,400,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	10 kali	84,397,000	APBD		10 kali	86,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	1 kali	20,000,000	BioCF/APBD		1 kali	20,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Patroli Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30 Kali	77,400,000	APBD		30 Kali	77,400,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	5 Kelompok	100,000,000	APBD		5 Kelompok	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	Desa Sungai Karang, Desa Napal Putih, Desa Aur Cino, Desa Teluk Kayu Putih, Desa Balai Rajo		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	Desa Pemayung, Desa Napal Putih, Desa Sungai Karang, Desa Semambu, Desa Dusun Baru, Desa Aur Cino, Desa Malako Intan		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Timur X	0.83%	297,400,000	Wlayah Kerja KPHP Tebo Timur		0.83%	469,963,666	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pengamanan dan Patroli Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur X	24 Kali	-	APBD		24 Kali	172,563,666	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	UPTD KPHP Tebo Timur X	1 kali	20,000,000	BioCF/APBD		1 kali	20,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Tebo Timur X	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Patroli Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur X	30 Kali	77,400,000	APBD		30 Kali	77,400,000	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Tebo Timur X	4 Kelompok	100,000,000	APBD		5 Kelompok	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur X
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Timur X	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Timur X
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Tebo Timur X	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Timur X
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Timur X	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Timur X
						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tebo Timur X	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tebo Timur X
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0.83%	477,400,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		0.83%	620,463,666	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Koordinasi, sinkronisasi dan rapat dengan tim terpadu	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Sosialisasi Pengamanan Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pengamanan dan Patroli Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	24 Kali	-	APBD		24 Kali	172,563,666	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan pembatasan Kerusakan kawasan hutan	Dukungan Penyelesaian Konflik Tenurial dan penegakkan hukum	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	10 Kali	200,000,000	APBD		10 Kali	170,500,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Patroli Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	30 Kali	77,400,000	APBD		30 Kali	77,400,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	3 Kelompok	100,000,000	APBD		3 Kelompok	100,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0.83%	555,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		0.83%	727,563,666	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pengamanan dan Patroli Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	24 Kali	-	APBD		24 Kali	172,563,666	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	50 Kali	150,000,000	APBD		50 Kali	150,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05	04	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan fasilitasi mediasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	3 kali	100,000,000	APBD		3 kali	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05	05	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	6 Kelompok	205,000,000	APBD		6 Kelompok	205,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		-	APBD			-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		-	APBD			-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		-	APBD			-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII

						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		-	APBD			-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	0.83%	872,112,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		0.83%	1,065,425,666	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan Patroli Pamhut dan Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan Patroli Pencegahan Karhutla	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi / Penyuluhan Dampak Kerusakan Hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan Dukungan penyelesaian konflik tenurial dan penegakan hukum	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pengamanan dan Patroli Peredaran Hasil Hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	24 Kali	-	APBD		24 Kali	172,563,666	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pembatasan kerusakan hutan melalui perlindungan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Kegiatan	197,112,000	APBD		1 Kegiatan	217,862,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	15 Operasi	100,000,000	APBD		15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	04	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan fasilitasi mediasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	3 kali	100,000,000	APBD		3 kali	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	6 Kelompok	205,000,000	APBD		6 Kelompok	205,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Regu	270,000,000	APBD		1 Regu	270,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			-				-	
						Frekuensi Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			-				-	

3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	0.83%	1,116,297,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	0.83%	1,063,997,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Patroli dalam rangka Perlindungan Hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	16 Kali	181,840,000	BioCF	16 Kali	143,340,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pembatasan kerusakan hutan melalui perlindungan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Kegiatan	197,112,000	APBD	1 Kegiatan	217,862,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	15 Operasi	100,000,000	APBD	15 Operasi	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05	04	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan fasilitasi mediasi	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	3 kali	100,000,000	APBD	3 kali	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.05	05	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training Masyarakat Peduli Api (MPA)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Kali	44,000,000	BioCF	1 Kali	44,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Pendirian Infrastruktur/fasilitas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Paket	344,635,000	BioCF	1 Paket	310,085,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45 Hari	148,710,000	BioCF	45 Hari	148,710,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK	Dinas Kehutanan	20%	63,099,100	Dinas Kehutanan	20%	69,409,100	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit management PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI-RPBBPHH	Bidang PPH	2 Unit management	63,099,100	APBD	2 Unit management	69,409,100	Bidang PPH
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137,500,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	145,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit management PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI-RPBBPHH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 Unit Managemen	137,500,000	APBD	6 Unit Managemen	145,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	105,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	105,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun

3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit management PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI-RPBBPHH	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 Unit Managemen	105,000,000	APBD		3 Unit Managemen	105,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
						Sosialisasi Pendampingan kpd Masy. / KTH	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun (APBD)	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun (APBD)
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan dan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Dinas)	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun	Dinas Kehutanan	45%	100,000,000	Dinas Kehutanan		50%	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Bidang PPH	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000	Bidang PPH
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218,294,340	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		66%	228,894,640	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Monitoring Izin Industri Primer	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Kali	13,200,000	BioCF/APBD		1 kali	13,200,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Monitoring Peredaran Bahan Baku	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 kali	13,200,000	BioCF/APBD		1 kali	13,200,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

3	28	03	1.07	03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 izin	91,894,340	APBD		3 izin	102,494,640	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45,000,000	Wilayah Kerja KPHP Tebo Timur		50%	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	4 Dokumen	45,000,000	APBD		4 Dokumen	50,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61,455,000	Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		50%	72,455,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	1 Dokumen	61,455,000	APBD		1 Dokumen	72,455,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah Inventarisasi dan Updating data terkini UIPHHK kapasitas < 6000 m3/tahun	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
						Jumlah monitoring dan pemantauan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi kurang 6000 m3 tahun	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		63%	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	10 Unit Manajemen	100,000,000	APBD		10 Unit Manajemen	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas Kehutanan	35%	399,000,000	Dinas Kehutanan		40%	468,220,000	Dinas Kehutanan

3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan atau Bibit Terdaftar	Jmlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Bidang PDASHL	2 Unit Usaha	55,000,000	APBD		2 Unit Usaha	86,760,000	Bidang PDASHL
						Monitoring dan Evaluasi	Bidang PDASHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Bidang PDASHL	2 Izin	11,000,000	APBD		2 Izin	14,460,000	Bidang PDASHL
						Monitoring dan Evaluasi	Bidang PDASHL	7 Izin	38,500,000	APBD		9 Izin	49,500,000	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Meningkatkan SDM	Bidang PDASHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Bidang PDASHL	2 Pemohon	11,000,000	APBD		2 Pemohon	11,000,000	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Meningkatkan SDM	Bidang PDASHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Bidang PDASHL	2 Pemohon	11,000,000	APBD		2 Pemohon	11,000,000	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan / atau Bibit	Jumlah data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar	Bidang PDASHL	19 Izin/ Lokasi	172,500,000	APBD		23 Izin/lokasi	195,500,000	Bidang PDASHL
3	28	03	1.09	06	Pembangunan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dibangun	Bidang PDASHL	2 Ha	100,000,000	APBD		2 Ha	100,000,000	Bidang PDASHL
						Pengawasan peredaran benih/bibit di KPHP	Bidang PDASHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASHL
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,2%	3,185,000,000	Dinas Kehutanan		0,2%	3,508,500,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	55%	1,985,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)		60%	2,208,500,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya)	Jumlah Patroli Pengamanan di UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	40 Kali	338,395,945	APBD		40 kali	400,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
						Jumlah Identifikasi dan Monitoring Calon Kemitraan Konservasi di Kawasn sekitar TAHURA Provinsi	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	-	-	APBD		-	-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
						Jumlah Sosialisasi Pengamanan Kawasan Hutan	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	-	-	APBD		-	-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	8 Kali	200,000,000	APBD		8 Kali	308,500,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah Luas Rehabilitasi di Areal TAHURA	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	50 ha dua desa dan P1	446,604,055	APBD		50 ha dua desa, p1 dan p2	500,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di TAHURA yang ditindak lanjuti	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	2 Paket	500,000,000	APBD		2 Paket	500,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)

3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	4 Desa	300,000,000	APBD		4 Desa	300,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang ditetapkan	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	20 Dokumen	200,000,000	APBD		20 Dokumen	200,000,000	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
						Jumlah Dokumen Desain Tapak Wisata Alam Tahura Bukit Sari dan Tahura Orang Kayo Hitam	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	-	-	APBD		-	-	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	Dinas Kehutanan	55%	300,000,000	Dinas Kehutanan		65%	300,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah pelaksanaan monitoring pengawasan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	Bidang PKSDAE	11 Lokasi	300,000,000	APBD		11 Lokasi	300,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas Kehutanan	55%	900,000,000	Dinas Kehutanan		65%	1,000,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.03	01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Potensi Pemanfaatan Pengembangan Kawasan Karst	Bidang PKSDAE	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	300,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah peningkatan kualitas masyarakat disekitar kawasan ekosistem esensial	Bidang PKSDAE	2 Lokasi	300,000,000	APBD		2 Lokasi	350,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Peningkatan Pengelolaan Kawasan Daerah Penyangga	Bidang PKSDAE	2 Lokasi	300,000,000	APBD		2 Lokasi	350,000,000	Bidang PKSDAE
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	20%	7,746,104,340	Dinas Kehutanan		26%	7,946,126,285	Dinas Kehutanan
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Dinas Kehutanan	41.62%	1,229,600,000	Dinas Kehutanan		50.20%	2,893,800,000	Dinas Kehutanan
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	Bidang PPMHA	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	Bidang PPMHA

						Jumlah Sekolah lapang agroforestri melibatkan petani, fasilitator, PPL	Bidang PPMHA	2 Kali	100,000,000	BioCF		5 Kali	250,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM bagi petani hutan	Bidang PPMHA	-	-	BioCF		4 Kali	160,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah penghargaan yang diraih oleh penyuluh kehutanan dan binaannya	Bidang PPMHA	-	-	APBD		1 Kategori Lomba Wana Lestari	200,000,000	Bidang PPMHA
						Seri Pelatihan Staff untuk GIS, Resolusi Konflik, Rencana Bisnis, SOP, Petugas Kehutanan dan Penyuluh	Bidang PPMHA	2 Paket	150,000,000	BioCF		1 Paket	75,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	Bidang PPMHA	4	100,000,000	APBD		4	100,000,000	Bidang PPMHA
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KTH	Jumlah penyediaan sarana ekonomi produktif	Bidang PPMHA	1 Kali	120,000,000	BioCF		1 Kali	120,000,000	Bidang PPMHA
						Fasilitasi Pertemuan Desa/Kelompok	Bidang PPMHA	-	-	BioCF		24 Paket	76,800,000	Bidang PPMHA
						Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	Bidang PPMHA	-	-	APBD		4 RPHA	200,000,000	Bidang PPMHA
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Bidang PPMHA	-	-	APBD			-	Bidang PPMHA
						Jumlah KUPS yang meningkat Kelasnya	Bidang PPMHA	-	-	APBD		4 KUPS	200,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah Fasilitasi Mediasi Konflik	Bidang PPMHA	4 Kali	329,600,000	BioCF		4 Kali	293,000,000	Bidang PPMHA
						Fasilitasi penguatan manajemen kelompok	Bidang PPMHA	-	-	BioCF		23 Paket	69,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah FGD belajar bersama pemegang izin Perhutanan Sosial	Bidang PPMHA	2 Kali	150,000,000	BioCF		2 Kali	150,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah FGD penyiapan rencana bisnis	Bidang PPMHA	-	-	BioCF		4 Kali	280,000,000	Bidang PPMHA
						Frekuensi Fasilitasi pembangunan BUMDES Kelompok Perhutanan Sosial dan pelaku usaha lainnya	Bidang PPMHA	-	-	BioCF		5 Kali	200,000,000	Bidang PPMHA
						Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	Bidang PPMHA	2 Kali	100,000,000	BioCF		2 Kali	100,000,000	Bidang PPMHA
						Frekuensi Fasilitasi akses permodalan ke BLU dan lembaga keuangan lainnya	Bidang PPMHA	1 Kali	40,000,000	BioCF		4 kali	160,000,000	Bidang PPMHA
						Honor Pegawai Non ASN	Bidang PPMHA	1 Kali	40,000,000	BioCF		4 kali	160,000,000	Bidang PPMHA
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41.46%	568,747,355	UPTD KPHP Kerinci Unit I		49.06%	668,363,140	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I

3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 Kelompok	35,000,000	APBD		4 Kelompok	38,500,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah sosialisasi pada KTH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 KTH	32,000,000	APBD		4 KTH	35,200,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah AD/ART KTH yang tersusun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 KTH	45,000,000	APBD		4 KTH	49,500,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah RKU/RKT KTH yang tersusun	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 KTH	45,000,000	APBD		4 KTH	49,500,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Kerinci Unit I	4 KUPS	92,963,865	APBD		4 KUPS	123,951,820	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah pelatihan pada KUPS	UPTD KPHP Kerinci Unit I	3 KUPS	38,783,490	APBD		3 KUPS	51,711,320	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah pendampingan pengolahan dan pemasaran hasil	UPTD KPHP Kerinci Unit I	3 KUPS	60,000,000	APBD		3 KUPS	70,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi bantuan alat ekonomi produktif	UPTD KPHP Kerinci Unit I	3 KUPS	70,000,000	APBD		3 KUPS	75,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
						Jumlah sosialisasi perhutanan sosial	UPTD KPHP Kerinci Unit I	2 KTH	50,000,000	APBD		3 KTH	75,000,000	UPTD KPHP Kerinci Unit I
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25.26%	1,470,307,465	BioCF/APBD		33.19%	627,757,820	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Sekolah Lapang agroforestry melibatkan petani, pendamping, PPL	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 SL	5,000,000	BioCF/APBD		2 SL	92,995,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	4 Kelompok	35,000,000	APBD		4 Kelompok	38,500,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Peningkatan Kapasitas KPH untuk bisnis yang berorientasi ER (memfasilitasi penguatan kelembagaan petani)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Paket	35,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah luas Penanaman dan Pemeliharaan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	20 Ha	179,040,000	BioCF		20 Ha	144,040,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pelatihan Petani dan staf KPH untuk Pengembangan Budidaya	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-		BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah fasilitasi Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas KTH dan PS	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 HD	6,300,000	BioCF/APBD		1 KTH	6,300,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	4 KUPS	92,963,865	APBD		4 KUPS	123,951,820	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

						Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2 kali	25,600,000	BioCF/APBD		2 kali	25,600,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pelaksanaan Mediasi Konflik	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	17 Kali	478,878,600	BioCF/APBD		2 Kali	51,371,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pengembangan model (bisnis) dataran tinggi dan dataran rendah) termasuk kemitraan desa hijau yang dikelola swasta	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	20 Ha	150,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah pertemuan bisnis untuk membangun kemitraan pemasaran dengan pihak lain	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Kali	35,000,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah fasilitasi pengembangan bisnis antara Petani dengan Pihak Pemerintah dan Pelaku bisnis	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	2 Paket	68,175,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Pelatihan Pengembangan Bisnis Ekonomi Masyarakat	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 paket	109,350,000	BioCF/APBD		1 paket	45,000,000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana produksi kopi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	1 Paket	150,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
						Jumlah Peket pengadaan sarana dan prasarana produksi (mesin pengolah aren dan rumah produksi)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31.45%	1,142,963,865	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		38.05%	423,951,820	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Paket Pelatihan GIS, Resolusi Konflik, Rencana Bisnis dan SOP untuk Staf KPHP Merangin	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Pelatihan Alih Teknologi produksi Gula Aren	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Kelas	30,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Pelatihan Transfer teknologi produksi kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Kelas	40,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Sekolah Lapang Pengelolaan Aren	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 SL	15,000,000	BioCF		1 SL	10,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

						Jumlah Sekolah Lapang Budidaya Kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Kelompok	20,000,000	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Paket Pelatihan petani dan staf KPH untuk pengembangan budidaya Aren	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	20,000,000	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Paket Pelatihan Petani dan Staf KPH untuk pengembangan budidaya kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Paket	20,000,000	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan berbagi pembelajaran antara pemegang lisensi PS	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4 Kali	40,000,000	BioCF/APBD		2 Kali	20,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	05	1.01	02	Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4 KUPS	92,963,865	APBD		4 KUPS	123,951,820	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Paket Sekolah Lapang agroforestri melibatkan petani, fasilitator, PPL	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	3 Paket	30,000,000	BioCF/APBD		1 Paket	10,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan Fasilitasi mediasi konflik	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 kali	70,000,000	BioCF/APBD		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Kelompok yang difasilitasi penguatan manajemen grup PS Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	10 Kelompok	50,000,000	BioCF		2 Kelompok	10,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Paket Pelaksanaan Fasilitasi pertemuan desa/ kelompok Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	7 Paket	70,000,000	BioCF/APBD		1 Paket	10,000,000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi Pemasaran Gula Aren	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi Pemasaran Kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Penanaman dan perawatan Agroforestry Aren Kegiatan Pengembangan Model (dataran tinggi dan dataranrendah) termasuk Kemitraan Desa Hijau yang dikelola Swasta	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	30 Ha	150,000,000	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Penanaman dan perawatan Agroforestry Kopi Kegiatan Pengembangan Model (dataran tinggi dan dataran rendah) termasuk Kemitraan Desa Hijau yang dikelola Swasta	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	20 Ha	200,000,000	BioCF		-		- UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

						Frekuensi sosialisasi dan pelatihan Pengembangan PS	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	5 Kali	25,000,000	BioCF		-		-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah Identifikasi Potensi Bisnis untuk Komoditi Terpilih	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Kali	10,000,000	BioCF		-			UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan fasilitasi untuk membangun kerjasama PS group dengan BUMDES dan pelaku usaha lainnya	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Kali	10,000,000	BioCF		2 Kali	20,000,000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan bisnis	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	1 Kali	20,000,000	BioCF		1 Kali	20,000,000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan Pertemuan bisnis untuk membangun kemitraan pemasaran dengan pihak lain (toko retail, toko online, dll) produk Gula Aren dan Kopi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	-	BioCF		-			UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 Kali	10,000,000	BioCF		-			UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
						Jumlah pelaksanaan fasilitasi pertemuan untuk mempersiapkan rencana bisnis	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	2 kali	20,000,000	BioCF					UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34.75%	300,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		40.25%	300,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang diberdayakan	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun (APBD)		-	APBD			-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun (APBD)
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	05	1.01	02		Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	05	1.01	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	2 KUPS	100,000,000	APBD		2 KUPS	100,000,000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32.65%	812,134,400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		37.45%	744,884,400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah paket Sekolah Lapang Agroforestry melibatkan petani, pendamping, PPL	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Pelatihan GIS dan Pemetaan untuk Staff	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	70,000,000	BioCF		1 Paket	70,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	05	1.01	02	Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	3,170,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Fasilitasi desa/Pertemuan kelompok	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	3,170,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah paket Fasilitasi akses permodalan Ke BLU dan lembaga keuangan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	34,350,000	BioCF/APBD		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Penanaman Agroforestry	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	16,892,000	BioCF		1 Dokumen	14,832,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah KTH yang di Fasilitasi untuk kenaikan kelas	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 KUPS	100,000,000	APBD		2 KUPS	100,000,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Studi Banding Antar Pemegang Izin Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Fasilitasi untuk membangun kerjasama kelompok PS dengan BUMDES dan pelaku usaha lainnya	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Fasilitasi rencana bisnis	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	-	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Sosialisasi Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	13,215,000	BioCF/APBD		1 Paket	13,215,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Paket	36,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

						Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Dokumen	25,950,000	BioCF/APBD		1 Dokumen	25,950,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Fasilitasi Mediasi Konflik	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 kali	113,700,000	BioCF/APBD		2 kali	113,700,000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
						Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 izin PS	95,687,400	APBD		2 izin PS	107,187,400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27.85%	280,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX		31.05%	240,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	05	1.01	02		Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	05	1.01	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	3 KUPS	80,000,000	APBD		2 KUPS	40,000,000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27.85%	260,885,255	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		31.05%	287,357,105	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	05	1.01	02		Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	05	1.01	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	2 KUPS	60,885,255	APBD		2 KUPS	87,357,105	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27.85%	322,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		31.05%	366,400,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	05	1.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	05	1.01	02		Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	5 KTH	150,000,000	APBD DAK		5 KTH	180,000,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
3	28	05	1.01	03		Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	3 KUPS	72,000,000	APBD		3 KUPS	86,400,000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27.85%	300,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		31.05%	300,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	3 KTH	100,000,000	APBD		3 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	6 KUPS	100,000,000	APBD		2 KUPS	100,000,000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	27.85%	287,483,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		31.05%	402,806,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM di Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		5 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan tingkat SLTA/SMK Kehutanan		4 Orang	-			4 Orang	-	
						Jumlah dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan tingkat S1 Kehutanan	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Orang	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		1 Orang	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Bantuan Alat Ekonomi Produktif	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Kegiatan	87,483,000	APBD		1 Kegiatan	102,806,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	2 Kali	-	APBD		2 Kali	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
						Jumlah Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KUPS	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	-	-	APBD		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	27.85%	771,983,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		31.05%	690,806,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	4 Orang	100,000,000	APBD		4 Orang	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	5 KTH	100,000,000	APBD DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Alat Ekonomi Produktif yang berikan ke petani	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Paket	75,000,000	BioCF		-	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah Kelompok yang didampingi untuk peningkatan kapasitas	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 KTH	22,500,000	BioCF		2 KTH	10,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah KTH yang di Fasilitasi untuk kenaikan kelas	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	5 KTH	100,000,000	APBD/DAK		5 KTH	100,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah Paket Sekolah Lapang Agroforestry Melibatkan Petani, Pendamping, PPL	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 SL	35,000,000	BioCF		2 SL	70,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1 Kegiatan	87,483,000	APBD		1 Kegiatan	102,806,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	6 Kali	102,000,000	BioCF		6 Kali	58,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Fasilitasi Mediasi Konflik	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		-	BioCF			-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		-	BioCF			-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan kelasnya	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	2 KTH	150,000,000	APBD		2 KTH	150,000,000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN ALIRAN DAERAH SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	12%	226,894,000	Dinas Kehutanan		15,78%	249,584,000	Dinas Kehutanan
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	Bidang PDASRHL	8 UPTD dan 12 Kelompok	226,894,000	APBD		10 UPTD dan 7 Kelompok	249,584,000	Bidang PDASRHL
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Das	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Bidang PDASRHL	4 Dokumen	80,000,000	APBD		4 Dokumen	80,000,000	Bidang PDASRHL
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Bidang PDASRHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASRHL
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah kegiatan perbaikan dan pemeliharaan serta peningkatan produktivitas tanah untuk ketersediaan air	Bidang PDASRHL	-	-	APBD		-	-	Bidang PDASRHL
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Bidang PDASRHL	4 Kelompok	96,894,000	APBD		2 Kelompok	119,584,000	Bidang PDASRHL
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang dibentuk dan dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Bidang PDASRHL	4 Lembaga	50,000,000	APBD		3 Lembaga	50,000,000	Bidang PDASRHL

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pilihan					
	Bidang Urusan Pemerintahan					
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Program Pengelolaan Hutan	<i>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD</i>	Dinas dan UPTD	0,20%	28.117.003. 660	APBD
		<i>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</i>	Dinas dan UPTD	1,58%	-	APBD
		Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Dinas dan UPTD	0,83%	-	APBD
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	Dinas	65,00%	210.000.00 0	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan	Dinas	64,66%	300.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	200.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	210.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur XIV)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	70%	100.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	40.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	-	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					(UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)					
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	40%	80.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan pemanfaatan di Kawasan Hutan	Dinas	50%	2.243.449.240	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan Masyarakat	Dinas	7 Lokasi	147.000.000	APBD

					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	40%	148.482.100	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	830.340.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Barat Unit IX)	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH	UPTD KPHP Tebo Barat	11%	300.000.000	APBD

				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Timur Unit X)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	169.739.450	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	167.033.000	APBD
				Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	320.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjung Timur Unit XIV)	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	47%	235.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi	UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.655.000.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	Dinas	24%	475.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	652.100.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	778.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	180.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	230.200.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/ kebun bibit tanaman kehutanan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	333.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	60%	208.000.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	Dinas	0,83%	3.481.850.000	APBD

					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	729.174.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	706.897.650	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	862.424.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangu n	0,83%	628.944.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangu n	0,83%	713.322.500	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	381.797.000	APBD

					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	297.400.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	477.400.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	555.000.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	872.112.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	1.116.297.000	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan Pelaksanaan Identifikasi Potensi HHBK	Dinas	20%	63.099.100	APBD

					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan Pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	-	-	-
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (Dinas)	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun	Dinas	45%	100.000.000	-
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu legal	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas	35%	399.000.000	Dinas
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM NYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	Dinas	0,2%	3.185.000.000	Dinas
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	UPTD Tahura Taman Hutan Raya	55%	1.985.000.000	UPTD Tahura Taman Hutan Raya

					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convention on international Trade In Endangered Species) Untuk kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk kewenangan daerah	Dinas	55%	300.000.000	Dinas
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas	55%	900.000.000	Dinas
					Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang di kelola oleh masyarakat secara optimal	Dinas	20%	7.746.104.340	Dinas
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	Dinas	41,62	1.229.600.000	Dinas
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46%	568.747.355	-

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutana n sosial	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26%	1.470.307.465	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutana n sosial	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	1.142.963.865	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutana n sosial	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	34,75%	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutana n sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65%	812.134.400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutana n sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	280.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	260.885.255	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	322.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	287.483.000	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	27,85%	771.983.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI
					Program Pengelolaan Aliran Daerah Sungai (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	Dinas	12%	226.894.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI

					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS Pendataan Lahan Kritis	Dinas	4 Dokum en	80.000.000	APBD
--	--	--	--	--	---	--	-------	------------------	------------	------

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2021 - 2026 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kinerja yang baru dan benar – benar yang tepat sasaran. Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicantumkan dalam RPJMN Republik Indonesia dan juga Provinsi Jambi Khususnya Dinas Kehutanan berkaitan dengan Tingkat Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terutama target capaian penurunan titik api dan peningkatan luas kawasan hutan yang tertutup pohon dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga dengan terwujudnya target capaian tersebut visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dapat diwujudkan.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2021-2026, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui ;

1. Optimalisasi kerjasama internal lingkup kehutanan dan eksternal lintas instansi,

2. Optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta jumlah maupun kemampuan/ profesionalisme SDM bagi upaya pencapaian kinerja sesuai kondisi objektif.
3. Peran serta dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan bidang kehutanan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi kedepan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.